

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Amarudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- A. P. Parlindungan, 1992, *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas*, Bandung: Mandar Maju
- Arikuntom, Suharsimi 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cipta
- Gautama, Sudargo, 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni
- Hadi, Soetrisno, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*, Jakarta: Djambatan
- Ismaya, Samun ,2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- F.X. Soekarmo, 2003, *Status Tanah Timbul di Kawasan Pantai Utara Dikaitkan dengan Upaya Rehabilitasi Pantai*, Semarang: Semiloka
- Penyusunan Pola Umum Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah
- Santoso, Urip 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana

Sembiring, Jimmy Joses, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta:

Visi Media

Sitorus, Oloan, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra

Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*,

Jakarta: CV Rajawali

Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta

Sumardjono, Maria S.W, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan*

Implementasi, Jakarta: Kompas

Yosua, Suhanan 2010, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem*

Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta: Restu Agung

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria 1960

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Peraturan Menteri negara Agraria/KaBPN No.3 Tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan keputusan pemberian hak tanah negara, demi terciptanya Kepastian Hukum

Peraturan Menteri Agraria/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

C. Penelitian-Penelitian

Eni Nur'aeni, Ana Silviana, Triyono, *Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Pantai Lestari Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Undip, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Khairizal Dermawan Lahabu, *Studi Tentang Pendudukan Terhadap Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kawasan Danau Limboto*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya, Tahun

D. Tulisan yang Tidak Diterbitkan

Iga Gangga Santi Dewi, *Hukum Tata Cara Perolehan Tanah*, Materi Kuliah
Hukum Tata Guna Tanah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E. Internet dan Lainnya

<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11095>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2025>

LAMPIRAN